

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 4 Maret 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Timesindonesia.co.id	Jumat, 4 Maret 2022	Kementerian PUPR Dorong Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi Jalan Tol	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan tol guna menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/399130/kementerian-pupr-ri-terus-lakukan-transformasi-inovasi-dan-modernisasi-jalan-tol</p> <p>https://independensi.com/2022/03/03/kementerian-pupr-dorong-transformasi-inovasi-dan-modernisasi-jalan-tol/</p> <p>https://www.industry.co.id/read/103103/tingkatkan-pelayanan-dan-manajemen-jalan-tol-kementerian-pupr-dorong-transformasi-inovasi-dan-modernisasi-jalan-tol</p> <p>https://mitrapol.com/2022/03/02/tingkatkan-pelayanan-dan-manajemen-jalan-tol-kementerian-pupr-dorong-transformasi-inovasi-dan-modernisasi-jalan-tol/</p> <p>https://www.beritasatu.com/ekonomi/897535/pupr-targetkan-tol-nirsentuh-beroperasi-penuh-akhir-2023</p>
2	Independensi.com	Jumat, 4 Maret 2022	Kementerian PUPR Tingkatkan Penanganan Tanggap Darurat Banjir Kota Serang	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan berbagai upaya untuk penanganan tanggap darurat banjir Kota Serang yang terjadi pada awal Maret 2022 akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Senin malam (28/2/2022).</p> <p>https://independensi.com/2022/03/03/kementerian-pupr-tingkatkan-penanganan-tanggap-darurat-banjir-kota-serang/</p> <p>https://www.industry.co.id/read/103129/kementerian-pupr-tingkatkan-penanganan-tanggap-darurat-banjir-kota-serang</p> <p>https://wartaekonomi.co.id/read396864/tingkatkan-penanganan-tanggap-darurat-banjir-kota-serang-kementerian-pupr-kirim-mobil-tangki-air-bersih-hingga-toilet? ga=2.191971881.2081499124.1646349891-208219728.1637709824</p> <p>https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-lakukan-penanganan-tanggap-darurat-banjir-kota-serang</p>

				https://mitrapol.com/2022/03/03/kementerian-pupr-tingkatkan-penanganan-tanggap-darurat-banjir-kota-serang/
3	Industry.co.id	Jumat, 4 Maret 2022	Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Rest Area Gunung Mas Puncak, Siap Ditempati 516 PKL	<p>Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan Rest Area Gunung Mas Puncak sebagai bagian dari dukungan penataan Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Rest area ini berfungsi menata pedagang kaki lima (PKL) atau usaha mikro serta meningkatkan kegiatan agrowisata sehingga meningkatkan perekonomian di Kawasan Puncak pasca pandemi Covid-19.</p> <p>https://www.industry.co.id/read/103134/pembangunan-rest-area-gunung-mas-puncak-rampung-siap-ditempati-516-pedagang</p> <p>https://independensi.com/2022/03/03/kementerian-pupr-rampungkan-pembangunan-rest-area-gunung-mas-puncak-siap-ditempati-516-pkl/</p> <p>https://wartaekonomi.co.id/read396866/rampung-dibangun-sebanyak-516-pkl-siap-tempati-rest-area-gunung-mas-puncak?_ga=2.191971881.2081499124.1646349891-208219728.1637709824</p> <p>https://mitrapol.com/2022/03/03/pembangunan-rest-area-gunung-mas-puncak-rampung-kementerian-pupr-siap-ditempati-516-pkl/</p> <p>https://www.jawapos.com/infrastruktur/03/03/2022/pupr-tuntaskan-pembangunan-rest-area-gunung-mas-mampu-tampung-516-pkl/</p>

Judul	GEMPA PASAMAN BARAT - Menko PMK Meminta Validasi Data Dipercepat	Tanggal	4 Maret 2022
Media	Kompas, Halaman 11		
Resume	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta validasi data korban dan kerusakan akibat gempa M 6,1 di Pasaman Barat, Sumatera Barat, diselesaikan sebelum 10 Maret 2022. Muhadjir juga berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera menyediakan fasilitas MCK.		

GEMPA PASAMAN BARAT

Menko PMK Meminta Validasi Data Dipercepat

PASAMAN BARAT, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta validasi data korban dan kerusakan akibat gempa M 6,1 di Pasaman Barat, Sumatera Barat, diselesaikan sebelum 10 Maret 2022. Tujuannya agar bantuan bisa cepat disalurkan serta rehabilitasi dan rekonstruksi segera dilaksanakan.

"Kami harapkan sebelum 10 Maret (batas akhir masa tanggap darurat bencana di Pasaman Barat dan Pasaman) data itu sudah tersampaikan ke pemerintah sehingga kami bisa memberikan uang tunggu secepat mungkin," kata Muhadjir dalam kunjungannya di Pasaman Barat, Kamis (3/3/2022).

Muhadjir juga meminta percepatan pendataan kerusakan infrastruktur, termasuk fasilitas umum. Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilaksanakan.

Selanjutnya, Muhadjir meminta agar ada peningkatan kebersihan dan kebutuhan di tenda pengungsi, khususnya toilet dan air bersih. Menko PMK melihat ketersediaan kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK) di tempat-tempat pengungsian belum mencukupi.

Muhadjir berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera menyediakan fasilitas MCK. "Jika ada bantuan dari instansi lain, termasuk TNI-Polri, kalau punya MCK mobil, saya imbau segera dikirim," ujarnya.

Ia juga meminta petugas di posko pengungsian mengadakan pelayanan kesehatan dan penyembuhan trauma (*trauma healing*) serta percepatan perbaikan akses Simpang Empat menuju Tahu yang terputus akibat longsor.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, hingga Rabu siang, tercatat 7.464 warga berada di pos-pos pengungsian. Sebelumnya, jumlah pengungsi lebih dari 14.000 orang.

"Jumlah warga mengungsi di Pasaman Barat tercatat 5.636 orang yang tersebar di 15 pengungsian. Sementara di Pasaman, warga yang mengungsi tercatat 4.407 orang atau 10-40 keluarga," kata Muhari dalam siaran pers, Rabu.

Di tempat pengungsian halaman kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis siang, pengungsi masih bertahan. "Saya ingin pemerintah secepatnya mendata rumah yang rusak agar bantuan (untuk rehabilitasi dan rekonstruksi) dapat segera disalurkan," kata Rozali (43), pengungsi dari Jorong Mudik Simpang, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat.

Banjir di Serang

Di Banten, Pemerintah Kota Serang menyatakan hingga Kamis (3/3), 2.431 rumah terdampak banjir, 2.900 warga mengungsi ke rumah kerabat atau posko pengungsian, serta enam warga meninggal karena terserum, hanyut, dan tertimpa longsor.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian I Ketut Jayada menyebutkan, curah hujan mencapai 243 milimeter sehingga Bendungan Sindangheula menampung 11 juta meter kubik air. Kelebihan 2 juta meter kubik air dari daya tampungnya membuat secara otomatis air mengalir ke hilir melalui Sungai Cibanten.

Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 Maret 2021. Bendungan yang dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp 458 miliar itu diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten, khususnya Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Pemerintah Provinsi Banten berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Serang dan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian untuk penanggulangan banjir dari hulu Sungai Cibanten di Ciomas ke hilir di Karangantu.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memastikan, pembenahan hilir mutlak untuk penanggulangan banjir. Pemerintah daerah akan merampungkan detail desain pembenahan badan sungai dan menertibkan bangunan di bantaran yang turut mempersempit aliran sungai. (NDU/JOL/DAN)

Judul	Perlu Pemetaan Detail Rumah bagi MBR Informal	Tanggal	4 Maret 2022
Media	Investor Daily, Halaman 11		
Resume	Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengatakan, dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka.		

Perlu Pemetaan Detail Rumah bagi MBR Informal

JAKARTA – Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengatakan, dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail.

Oleh Imam Mudzakir

Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka.

"Jika sektor informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan," kata Iwan dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.

Dia mencontohkan petani yang bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi. "Jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal," tambah Iwan. Adanya Grand Design nantinya mempermudah perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi para MBR informal.

Ke depannya, kata Iwan, para MBR informal dikelompokkan sesuai profil risiko masing-masing yang terbagi menjadi risiko rendah, sedang dan tinggi. "Sehingga nantinya pemberian bantuan Kredit Kepemilikan Rumah bagi MBR informal didapatkan skema yang tepat," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa program pembangunan perumahan bagi MBR informal seperti Perumahan bagi Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lalu, perumahan bagi penyapu jalan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Menurut Kementerian PUPR, semuanya tidak terlepas dari kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk

dapat menciptakan hunian yang layak huni bagi MBR Informal. Seperti contoh pada pembangunan perumahan bagi guru honorer di Kabupaten Kendal, mereka dijamin oleh pemerintah daerah setempat dalam pembangunan rumah tersebut dan mempermudah proses perizinan dalam pembangunannya.

Kementerian PUPR menyatakan bahwa pihaknya melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal. Langkah tersebut mengatasi kekurangan perumahan (*backlog*) dan mendorong masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, *backlog* kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan *backlog* keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93% *backlog* kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan MBR sejumlah 33% dan masyarakat miskin sejumlah 60%, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki, dalam keterangan tertulis.

Pembiayaan Tapera

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sampai dengan Februari 2022 menyalurkan 527 rumah melalui skema pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP) senilai Rp 57,69 miliar atau 0,26% dari target yang ditentukan.

Komisiner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, pemerintah telah memberikan izin penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPPP tahun 2022 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan



Beritasatu Photo/Uthman AR

Syarat Pengurusan Surat Tanah

Pekerja menyelesaikan bangunan perumahan di Depok, Jawa Barat. Kartu BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat pengurusan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) karena jual beli yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Ketua Komite Investasi Pemerintah pada 17 Februari 2022.

"Penyaluran dana FLPP perdana ini melalui BTN Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD Sumsebelabel, dan BPD Nagari," kata Adi dalam siaran pers, baru-baru ini.

Sesuai dengan isi surat, Kementerian Keuangan RI menyetujui usulan penyaluran FLPP oleh BP Tapera sebanyak 200.000 ribu unit kepada MBR dengan alokasi Dana DIPA 2022 sebesar Rp19,1 triliun dengan mekanisme dan besaran pencairannya disesuaikan

dengan kinerja penyaluran dan jadwal waktu yang telah disusun.

BP Tapera telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sejak 22 Desember 2021 untuk mengelola dana FLPP.

Adi Setianto menyampaikan bahwa, BP Tapera dalam pengelolaan dana investasi tersebut akan memastikan penyaluran FLPP dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, dan monitoring evaluasi kinerja yang efektif.

Dalam menyalurkan dana FLPP BP Tapera pada tahun 2022 bekerjasama dengan 39 Bank Penyalur yang ter-

diri dari 8 bank nasional dan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD) baik Konvensional maupun Syariah. Bank Nasional tersebut antara lain BTN, termasuk BTN Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BSI, Artha Graha, dan Mega Syariah.

Untuk BPD, di antaranya BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, dan BPD Sulawesi Tengah.

Dalam penyaluran dana FLPP, Adi Setianto mengingatkan kepada Bank Penyalur agar memperhatikan ketentuan pengajuan pencairan,

yaitu pemenuhan administrasi Surat Pernyataan Verifikasi KPR Sejahtera dan pemenuhan ketentuan KPR Sejahtera.

Adi Setianto meminta bank penyalur untuk memastikan kebenaran atas surat pernyataan yang dibuat oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi tentang kelengkapan fungsi bangunan rumah.

"Ini sesuai dengan lampiran pada berkas perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara BP Tapera dengan bank penyalur pada perjanjian kerja sama penyaluran FLPP Tahun 2022 yang telah ditandatangani akhir tahun lalu," kata dia.

Sementara itu, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan, pihaknya terus memberikan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan realisasi program sejuta rumah. Hal ini terbukti dari keseriusan BTN dalam Penyaluran KPR Subsidi untuk MBR.

Selama 72 tahun berdiri, BTN konsisten telah menyalurkan kredit dan mengalir lebih dari 5 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen. Sebanyak 3,5 juta unit di antaranya merupakan KPR Subsidi yang diperuntukkan bagi MBR.

"Selain KPR FLPP, BTN juga mendukung untuk menyalurkan program Tapera yg tersedia sebanyak 109.000 unit, juga menyalurkan KPR BP2BT kepada MBR," ungkap Hirwandi Gafar, dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.

Jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki hunian layak masih luar biasa banyak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendata akan ada 15,5 juta penduduk yang membutuhkan rumah pada 2045.

Adapun, saat ini angka *backlog* kepemilikan perumahan sesuai dengan Susenas tahun 2020 mencapai 12,75 juta unit. (ed)